



Pendaftar Siswa KMS Didata

Nina Atmasari

JOGJA—Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem *Real Time Online* (RTO) melakukan pendataan calon pendaftar yang menggunakan fasilitas Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Anehnya, dari para pemegang KMS yang termasuk kategori keluarga miskin ini, banyak yang datang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Bahkan, tempat parkir di halaman depan gedung Dinas Pendidikan Kota Jogja menjadi penuh oleh sepeda motor, sehingga sebagian dari sepeda motor diarahkan parkir di tepi Jalan Hayam Wuruk depan kantor Dinas.

Ratna, salah satunya. Ibu yang mengantar anaknya, Fristia Debi untuk pendataan KMS ini datang dengan sepeda motor, berboncengan dengan dua anaknya. "Naik sepeda motor, tapi pinjam," katanya, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut dari siapa ia meminjam kendaraan tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan Ika Susanti, yang mengantar anaknya Bagas Hernawan untuk pendataan. Warga Purbayan Kotagede itu mengaku terpaksa meminjam sepeda motor dari tetangganya. "Ini tadi pinjam sebentar untuk ke kantor Dinas. Setelah pulang nanti dikembalikan," katanya.

Ika Susanti mengungkapkan dirinya adalah janda, dan memiliki dua anak. Selain Bagas yang baru lulus SD, ada adiknya yang masih balita. Ika mengaku sebagai ibu rumah tangga dan masih memiliki anak kecil, tidak bisa bekerja.

Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Kota Jogja, Suryatmi mengungkapkan pemegang KMS merupakan *database* yang dihimpun Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Sosial pada

Desember 2012. "Dinas Sosial yang mengeluarkan KMS, saat ini, KMS itu digunakan untuk mendaftar sekolah," katanya.

Pemegang KMS yang akan mendaftarkan anaknya di SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Jogja harus melakukan pendataan. Proses ini dibuka mulai 18 Juni hingga 24 Juni. Hingga hari kedua kemarin, sudah ada 711 calon pendaftar yang melakukan pendataan, terdiri 322 lulusan SMP dan 389 lulusan SD.

Minta Evaluasi

Sekolah meminta pemilihan peserta KMS ditinjau. Jangan sampai, kata Kepala SMPN 8 Jogja, Suharno, ada peserta yang seharusnya layak, tetapi tidak terfasilitasi maupun sebaliknya. Sebab sekolah sempat menemukan beberapa kasus seperti itu.

"Ketika siswa sudah mulai pelajaran dan ditemui kendala, kami melakukan *home visit*. Dari situ diketahui ternyata siswa ini dari keluarga yang mampu, tetapi termasuk KMS," jelasnya.

Sebaliknya, sekolah pernah mendapati peserta dari keluarga tak mampu tetapi secara tiba-tiba kesertaan pada KMS dihentikan. Adapun orangtua murid itu hanya bekerja di bengkel kecil.

Sesuai ketentuan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja, sekolah tidak berhak ikut campur tangan dalam pendaftaran dan seleksi siswa KMS. Dari alasan ini, sekolah tidak dapat melakukan verifikasi data tetapi langsung mendidik siswa yang ditunjuk Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja.

Suharno menyampaikan sekolah tidak pernah menyoal perihal minimnya nilai peserta KMS. Justru sekolah bertugas mengembangkan siswa dengan *input* kecil agar dapat lulus dengan nilai yang memadai. "Tidak perlu melakukan tes kepada anak atau mematok nilai UAN minimal, cukup komitmen dari orangtua," imbuh dia. (Mediani Dyah Natalia/redaksi@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. UPT. JPD			

Yogyakarta, 30 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005